

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan sebagai institusi bisnis yang terlibat langsung dalam proses sosial di masyarakat yaitu melalui struktur ekonomi, tentunya tidak bisa terlepas dari struktur besar atau sistem sosial yang ada di dalam masyarakat. Perusahaan juga kemudian memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat karena bagian dari sub sistem yang ada di dalam masyarakat. Begitu juga sebaliknya, jika stabilitas masyarakat di sekitar perusahaan kurang baik, maka keberlangsungan jalannya perusahaan akan terancam. Perusahaan tidak akan bisa memproduksi dengan baik, atau menjalankan pelayanan jasanya dengan baik apabila keamanan di sekitar perusahaan pun tidak kondusif.

Sebagian alasan inilah yang biasanya digunakan perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab mereka kepada masyarakat di sekitar tempat perusahaan itu menjalankan produksi. Kotler mengatakan bahwa “agenda bersama untuk dunia yang lebih baik, dengan memahami bahwa komunitas membutuhkan dukungan perusahaan dan kemitraan untuk membuat dunia yang diharapkan terwujud.” Hal ini memang jelas terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Sebuah kegiatan yang bernama *Corporate Social Responsibility* (CSR) laris manis digunakan oleh berbagai perusahaan untuk membuktikan bahwa mereka peduli terhadap masyarakat sekitar. *Corporate Social Responsibility* dalam buku Arif Budimanta (2008) memiliki pengertian suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar tempat di mana perusahaan itu berada. CSR

merupakan jembatan bagi pertemuan antara kepentingan perusahaan dengan

Negara Indonesia sendiri telah membuat regulasi untuk memberikan kewajiban kepada perusahaan untuk melaksanakan CSR. Regulasi tentang CSR termuat dalam undang-undang no. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, tepatnya pasal 74 di mana semua Perusahaan yang berorientasi pada publik wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Peraturan ini pun berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Melanjutkan dari pada UU di atas, Peraturan Menteri BUMN no. 5 tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan.

PT. PLN (Persero) yang menyediakan energi listrik bagi masyarakat Indonesia dan merupakan BUMN otomatis juga melaksanakan program CSR tersebut. Seperti yang sudah disebutkan pada peraturan Menteri BUMN bahwa ada dua kegiatan yang wajib dilakukan oleh PT. PLN (Persero) yaitu Program Kemitraan dengan usaha kecil dan menengah, kemudian juga Program Bina Lingkungan atau yang biasa disebut Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan adalah merupakan Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Tujuan pelaksanaan Program Kemitraan yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja dengan mengimplementasikan praktik GCG (*Good Corporate Governance*) guna memposisikan perusahaan yang memiliki makna keberadaan di masyarakat (lingkungan) yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra perusahaan.

Selanjutnya Program Bina Lingkungan atau Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) merupakan hibah, untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha PT. PLN (Persero) dalam bentuk kegiatan berupa *Community Relation*,

Community Service, Community Empowering serta bantuan Pelestarian Alam.

Kedua program yang otomatis dijalankan oleh PT. PLN (Persero) ini berarti seluruh kantor Distribusi dan Area Pelayanan Jaringan (APJ) PT. PLN (Persero) di seluruh Indonesia juga wajib melaksanakannya. Pelaksanaan program yang menyeluruh diharapkan dapat berdampak bagi seluruh masyarakat sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dan masyarakat juga bersama-sama dengan PT. PLN (Persero) untuk menjaga instalasi PT. PLN (Persero). Dari seluruh cabang PT. PLN (Persero) di Indonesia, salah satu yang menjalankan yaitu PT. PLN (Persero) APJ Yogyakarta. Sumber dana untuk pelaksanaan program CSR APJ Yogyakarta berasal kantor PT. PLN Distribusi Jateng & DIY yang diberikan dalam dua tahap yaitu semester satu dan semester dua. Beberapa jenis kegiatan seperti *Community Relation, Community Service, Community Empowering*, dan Pelestarian Alam diharapkan mampu untuk memberikan dampak bagi masyarakat dengan hadirnya PT PLN (Persero) di daerah mereka. Pendanaan bagi jenis kegiatan sudah langsung dibagi oleh kantor distribusi dan kantor APJ langsung menjalankan.

Garis besar dari program CSR PT. PLN (Persero) telah menggambarkan pentingnya semua sektor kehidupan di masyarakat, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hal ini karena semua sektor kehidupan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Khususnya ekonomi, lingkungan, dan sosial harus diperhatikan untuk pembangunan berkelanjutan.¹ Pentingnya program CSR PT. PLN ini bagi kebutuhan masyarakat tentunya harus diikuti dengan pelaksanaan yang tepat sasaran. Apalagi di era teknologi informasi saat ini, dimana peredaran informasi yang cepat, menciptakan pemahaman baru bagi masyarakat. Situasi ini kemudian menciptakan perubahan pada struktur masyarakat hasil materialisasi dari

¹ Budimanta, A. Prasetijo, A. & Rudito, B. *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: ICSD, 2008 (hal. 49).

pemahaman baru.²

Kondisi ini, bagi penulis menciptakan sebuah tanggung jawab bagi perusahaan khususnya PT. PLN (Persero) yang telah diwajibkan lewat peraturan Menteri BUMN. Mekanisme kerja yang diciptakan oleh PT. PLN (Persero) secara normatif dikatakan berhasil, namun apakah dalam pelaksanaannya telah tepat sasaran? Kegiatan *Community Empowering* (CE) merupakan program CSR dari PT. PLN (Persero) yang memiliki pengertian sangat jelas yaitu untuk memberdayakan komunitas lokal lewat bantuan pendidikan dan pelatihan. Bisa dikatakan kegiatan CE ini menjadi satu-satu program CSR dari PT. PLN (Persero) yang memfokuskan kegiatannya pada pemberdayaan komunitas di dalam masyarakat yang tidak secara fisik seperti halnya *Community Service*. Dalam perkembangan mengenai konsep dan implementasi pemberdayaan komunitas, tentu kita mengetahui bahwa komunitas membutuhkan banyak bantuan dan arahan dari berbagai pihak, terutama institusi yang mampu untuk bisa membuka akses seluas-luasnya bagi komunitas untuk mendapatkan pengetahuan. Selain itu, menciptakan perubahan yang sesuai dengan potensi lokal mereka dan juga membaca peluang dari luar.³ Hal ini agar menjadi potensi bagi komunitas tersebut untuk bisa melanjutkan hidup mereka.

Pengetahuan melalui pendidikan dan juga di optimalkannya berbagai institusi yang berafiliasi langsung dengan komunitas merupakan upaya agar seluruh anggota komunitas dapat diberdayakan. Dalam pelaksanaannya, penerima bantuan kegiatan CE memang lebih banyak difokuskan untuk kelompok atau institusi bukan perorangan. Tetapi muncul pertanyaan bagi penulis, apakah kegiatan CE dalam pelaksanaannya telah tepat sasaran dalam

² Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990 (hal.135).

³ <http://fiqihsantoso.wordpress.com/2008>

hal ini program dan tujuan sesuai dengan pengertiannya. Ini karena, ketika penulis melakukan *Internship* selama 40 hari di HUMAS PT. PLN (Persero) APJ Yogyakarta, identifikasi masalah yang digunakan oleh tim PKBL hanya menggunakan proposal. Sedangkan *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Social Mapping* tidak digunakan oleh tim PKBL. Hanya dengan menerima proposal dari masyarakat, kemudian melakukan survei sekali. Hal ini yang menimbulkan rasa ingin tahu penulis, apakah dengan proses demikian mampu untuk menciptakan kegiatan yang sekiranya bisa memberdayakan masyarakat?

Untuk mengetahui Sumber Daya Manusia (SDM) dan potensi lokal masyarakat, tentunya kita harus lebih dulu mengenal karakteristik masyarakat. Demikian dikatakan karena Marx dalam Antropologi Ekonomi setiap masyarakat memiliki moda produksi yang berbeda.⁴ Alam menentukan bagaimana mekanisme produksi masyarakat yang kemudian membentuk budaya mereka. Tentu kebudayaan masyarakat berbeda, dan untuk itulah karakteristik mereka pun berbeda. Masyarakat perlu dipetakan terlebih dahulu, dikenal karakteristik mereka, kemudian diberikan bantuan dengan berpijak pada potensi lokal mereka agar mampu menangkap peluang yang ada di sekitar mereka. Tanpa diskusi yang mendalam, dan data yang tepat mengenai komunitas pemohon bantuan, apakah kegiatan CE dapat memberikan program yang tepat sehingga mampu memberdayakan masyarakat?

Penulis memiliki pengalaman lewat kegiatan *Internship* selama 40 hari di PT. PLN (Persero) APJ Yogyakarta. Hasil yang didapatkan dari kegiatan *Internship* selama 40 hari yaitu kurang dioptimalkannya FGD dan *Social Mapping* dalam pelaksanaan program CSR di bidang Bina Lingkungan, khususnya dalam kegiatan *Community Empowering*. Penggunaan

⁴Sairin, Sjafri, P. Semendi dan Bambang Hidayana. *Pengantar Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002 (Hal. 133).

kedua metode ini memang kurang efisien karena jika dengan proposal, PT. PLN (Persero) APJ Yogyakarta hanya perlu menunggu proposal yang berasal dari para pemohon bantuan. Tetapi untuk melihat apa kebutuhan masyarakat secara lebih dalam lagi dan untuk mengetahui apa potensi lokal dari komunitas untuk dapat dioptimalkan tentunya membutuhkan teknik yang sudah teruji. Jika teknik identifikasi masalahnya kurang tepat, tentunya menimbulkan pertanyaan apakah kegiatan *Community Empowering* ini telah memberdayakan masyarakat? Untuk itulah kemudian penulis mengambil judul Karya Tulis Ilmiah yaitu **Pelaksanaan Kegiatan *Community Empowering* PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Yogyakarta.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang mengenai pelaksanaan kegiatan *Community Empowering* dan apakah kegiatan ini telah memberdayakan atau belum, maka penulis membuat rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses kerja kegiatan *Community Empowering* PT. PLN (Persero) APJ Yogyakarta?
2. Apakah kegiatan *Community Empowering* telah memberdayakan komunitas penerima bantuan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan proses kerja kegiatan *Community Empowering* yang dilaksanakan oleh tim PKBL. Penulis juga ingin mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan *Community Empowering* telah memberdayakan komunitas

penerima bantuan.

D. Kerangka Konsep

1. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Definisi *Corporate Social Responsibility (CSR)* menurut PT. PLN (Persero) diimplementasikan dalam dua kegiatan yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan gabungan Program Kemitraan dahulu disebut program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dan Program Bina Lingkungan (sebelumnya *Community Development*). Program Kemitraan yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Program Bina Lingkungan atau Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) adalah pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program ini disalurkan kepada masyarakat untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha PT. PLN (Persero) dalam bentuk kegiatan berupa *Community Relation, Community Service, Community Empowering* serta bantuan Pelestarian Alam.

Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan, yang muncul sejak adanya pemahaman bahwa publik dan perusahaan memiliki suatu hubungan yang terkait. Konsep CSR pertama kali muncul didalam diskursus resmi akademik sejak Howard R. Bowen menerbitkan buku berjudul *Social Responsibility of The Busismen* pada 1953. Ide dasar yang dikemukakan Bowen mengacu pada kewajiban pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat di tempat perusahaan beroperasi. Menurut *The Word Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, lembaga internasional yang berdiri pada tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 multinasional

company yang berasal lebih dari 30 negara, mengatakan bahwa *Coorporate Social Responsibility* adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.⁵

Filantropi Perusahaan atau *corporate philanthropy* mungkin merupakan bentuk *Corporate Social Responsibility* yang paling tua. Pada aktivitas CSR ini perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan/paket bantuan atau pelayanan secara cuma-cuma. Kegiatan filantropi biasanya berkaitan dengan berbagai kegiatan sosial yang menjadi prioritas perhatian perusahaan. Berbagai program *corporate philanthropy* yang dilaksanakan perusahaan antara lain:

- a. Program *corporate philanthropy* dalam bentuk sumbangan uang tunai.
- b. Program *corporate philanthropy* dalam bentuk bantuan hibah.
- c. Program *corporate philanthropy* dalam bentuk penyediaan beasiswa.
- d. Program *corporate philanthropy* dalam bentuk pemberian produk.
- e. Program *corporate philanthropy* dalam bentuk pemberian layanan cuma-cuma.
- f. Program *corporate philanthropy* dalam bentuk penyediaan keahlian teknis oleh karyawan perusahaan secara cuma-cuma.
- g. Program *corporate philanthropy* dengan mengizinkan penggunaan fasilitas dan saluran distribusi yang dimiliki perusahaan untuk digunakan bagi kegiatan sosial.
- h. Program *corporate philanthropy* yang dilakukan perusahaan dengan cara menawarkan penggunaan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan.

⁵Sumardiyono, Eko. *Evaluasi Pelaksanaan Community Development Dalam Perolehan Proper Hijau (Studi Kasus di PT Pupuk Kaltim Bontang)*. 2007: hal. 35

Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dengan melaksanakan kegiatan corporate philanthropy adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan reputasi perusahaan.
- b. Memperkuat bisnis perusahaan di masa depan.
- c. Memberi dampak bagi penyelesaian masalah sosial dalam komunitas lokal.⁶

2. *Community Empowering*

Community Empowering menurut PT. PLN (Persero) adalah program pemberian bantuan untuk memberikan akses lebih luas kepada masyarakat guna menunjang kemandiriannya dengan berbasis pada pengembangan dan pemanfaatan potensi lokal yang akan menyerap tenaga kerja, seperti bantuan pendidikan, pelatihan kepada masyarakat, bantuan pengembangan/penguatan kelompok swadaya masyarakat, komunitas asli, organisasi profesi, dan bantuan peningkatan kapasitas usaha masyarakat berbasis sumberdaya setempat.⁷

Pemberdayaan dalam buku Jim Ife dan Frank Tesoriero (2002, hal. 130) adalah sentral bagi suatu strategi keadilan sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan. Keberdayaan berkaitan dengan berbagai aspek kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat. Meningkatkan keberdayaan membutuhkan partisipasi dari orang yang dirugikan secara struktural yaitu kelas sosial, gender dan ras. Kelompok lain yang juga dirugikan tapi tidak selalu merupakan korban dari struktur yaitu kelompok manula (manusia lanjut usia), penyandang cacat, mereka yang hidup di wilayah terpencil, dan kaum homo. Kebijakan dan perencanaan, serta aksi sosial politik, lalu pendidikan dan penyadartahuan untuk meningkatkan kekuasaan mereka agar tercipta keberdayaan. Apabila proses partisipasi kaum yang dirugikan berjalan dengan baik untuk

⁶<http://www.csrindonesia.com>

⁷<http://www.pln.co.id>

meningkatkan keberdayaan mereka, maka pemberdayaan menjadi proses untuk membangun suatu kebudayaan HAM.

Menurut Talcot Parsons *power* merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan *power* dalam *empowerment* adalah daya sehingga *empowerment* dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan.⁸

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat atau komunitas secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat (Karsidi, 1988)⁹ sebagai berikut:

a. Belajar dari Masyarakat

Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri.

b. Pendamping sebagai Fasilitator, Masyarakat sebagai Pelaku

Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu, perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu sendiri. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Walaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

c. Saling Belajar, Saling Berbagi Pengalaman

Salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan lokal masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan lokal (bahkan tradisional) masyarakat tidak sempat

⁸Sukmaniar. *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*. 2007 (Hal. 25).

⁹Karsidi, Ravik. *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil Dan Mikro*. Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional "Pengembangan Sumber Daya Manusia" Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana IPB. 21 September. 2005: hal. 5

mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga dapat memecahkan masalah mereka. Bahkan dalam banyak hal, pengetahuan modern dan inovasi dari luar malah menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Karenanya pengetahuan lokal masyarakat dan pengetahuan dari luar atau inovasi, harus dipilih secara arif dan atau saling melengkapi satu sama lainnya.

Tahapan pemberdayaan yang di paparkan oleh Isbandi Rukminto Adi (2001, hal. 162-

163), yaitu :

1. Tahap persiapan (*engagement*), tahap persiapan ini memiliki substansi penekanan pada dua hal elemen penting yakni penyiapan petugas dan penyiapan lapangan. Tahapan ini adalah tahapan prasyarat sukses atau tidaknya sebuah program pemberdayaan berlangsung.
2. Tahap pengkajian (*assessment*), sebuah tahapan dimana masyarakat telah terlibat aktif dalam penentuan program pemberdayaan karena masyarakat setempat yang sangat mengetahui keadaan dan masalah di tempat mereka berada. Tahapan ini memiliki penekanan pada faktor identifikasi masalah dan sumber daya yang ada dalam sebuah wilayah yang akan menjadi basis pemberdayaan serta pelaksanaan program.
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan (*designing*), dalam tahap ini program perencanaan dibahas secara maksimal dengan melibatkan peserta aktif dari pihak masyarakat guna memikirkan solusi atau pemecahan atas masalah yang mereka hadapi di wilayahnya. Dalam tahap ini dipikirkan secara mendalam agar program pemberdayaan yang ada nantinya tidak melulu berkisar pada program amal (*charity*) saja dimana itu tidak memberikan manfaat secara pasti dalam jangka panjang.
4. Tahap pemformulasian rencana aksi (*designing*), pada tahap ini masyarakat dan fasilitator menjadi bagian penting dalam bekerjasama secara optimal. Hal ini disebabkan masyarakat telah menjabarkan secara rinci dalam bentuk tulisan tentang apa-apa yang akan mereka laksanakan baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.
5. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan (implementasi), tahap ini merupakan bentuk pelaksanaan serta penerapan program yang telah dirumuskan sebelumnya bersama para masyarakat. Tahapan ini berisi tindakan aktualisasi bersinergi antara masyarakat dengan pelaku pemberdayaan (dalam bahasa Isbandi disebut sebagai petugas).
6. Tahap evaluasi, tahapan yang memiliki substansi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan dengan melibatkan warga. Tahapan ini juga akan merumuskan berbagai indikator keberhasilan suatu program yang telah diimplementasikan serta dilakukan pula bentuk-bentuk stabilisasi terhadap perubahan atau kebiasaan baru yang diharapkan terjadi.
7. Tahap terminasi (*disengagement*), sebuah tahapan dimana seluruh program telah berjalan secara optimal dan petugas fasilitator pemberdayaan masyarakat sudah akan mengakhiri kerjanya. Tahapan ini disebut sebagai tahap pemutusan hubungan antara petugas dengan para masyarakat yang menjadi basis program pemberdayaan ketika itu. Petugas pun tidak keluar dari komunitas secara total, melainkan ia akan

meninggalkannya secara bertahap.

Pranarka & Vidhyandika (1996, hal. 56) menjelaskan bahwa :

”proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apayang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”.

Sulistiyani (2004, hal. 40) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah

“untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.”

3. Partisipasi

Partisipasi di dalam Jim Ife dan Frank T. (2002, hal. 285) merupakan suatu bagian penting dari pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran. Semakin banyak orang menjadi peserta aktif dan semakin lengkap partisipasinya, semakin ideal kepemilikan dan proses masyarakat serta proses-proses inklusif yang akan diwujudkan. Partispasi tidak semata-mata secara khusus menyatakan HAM, tetapi juga untuk menggunakan haknya. Orang perlu terlibat dalam proses dengan orang lain dan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan serta keseimbangan kekuasaan. Partisipasi merupakan alat sekaligus tujuan dari tercapainya HAM. Partisipasi merupakan alat bagi masyarakat agar mampu berkontribusi dalam penentuan program ataupun kebijakan yang dapat mewakili hak-hak masyarakat. Apabila masyarakat telah berkontribusi dalam kegiatan, maka tujuan untuk mendapat hak pun bisa dikatakan

terpenuhi.

Partisipasi membutuhkan pendidikan sehingga masyarakat ketika ikut dalam penentuan program dan pengambilan keputusan mampu untuk mengidentifikasi permasalahan di sekitar mereka, kemudian juga mengerti konsekuensi apa yang akan dihadapi dengan keputusan yang sudah diambil. Dua konsep partisipasi yang dikenal berkaitan dengan peran warga negara yaitu mengenai demokrasi partisipatif dan demokrasi deliberatif.

Demokrasi partisipatif memindahkan proses kekuasaan dari sekelompok orang yang dipilih (demokrasi representatif) ke masyarakat. Tetapi jangan lupa fakta bahwa tidak semua masyarakat memiliki modal dan akses yang sama untuk berpartisipasi dalam penentuan program. Demokrasi partisipatif membutuhkan desentralisasi, akuntabilitas, pendidikan, dan kewajiban. Desentralisasi karena prinsip perubahan dari bawah, sehingga memerlukan struktur pembuatan keputusan yang terdesentralisasi, akuntabilitas karena bukannya hanya peran serta rakyat dalam membuat keputusan tetapi juga negara harus menjamin bahwa keputusan tersebut dijalankan. Pendidikan dibutuhkan karena masyarakat butuh penyadartahuan dan pendidikan ketika berpartisipasi dalam membuat keputusan, kemudian juga kewajiban karena hak masyarakat menentukan nasib mereka sendiri, tetapi juga kewajiban untuk berpartisipasi dalam membuat perubahan.

Demokrasi deliberatif berupaya membangun mekanisme yang memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam proses dileberatif, sehingga mreka dapat menjadi bagian dari pembuatan rencana secara aktual. Masyarakat diikutsertakan dalam dialog dengan pemerintah sebelum membuat perencanaan, bukan sekedar menempelkan “konsultasi masyarakat” setelah perencanaan dikembangkan, dan berupaya mendapatkan kearifan dan pengalaman masyarakat. Demokrasi liberatif menghargai kepakaran masyarakat, berupaya mencari peran

bagi masyarakat dalam mendefinisikan parameter-parameter permasalahan, dan tidak menempatkan pemerintah sebagai pakar yang memiliki pengetahuan dan kebijakan yang superior. Disini ada tingkat kontrol yang jauh lebih tinggi ditangan masyarakat. Program-program demokrasi deliberatif perlu melibatkan pendidikan masyarakat, perlu penyediaan pengetahuan dan sumber daya bagi masyarakat agar dapat terlibat dalam permasalahan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Fakta yang mendasari penelitian ini dilakukan, diambil dari pelaksanaan kegiatan *Community Empowering* di PT. PLN (Persero) APJ Yogyakarta periode pada tahun 2010 hingga bulan Juni 2011.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Karya Tulis Ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif bermula dengan mendefinisikan konsep-konsep yang sangat umum. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Penulis kemudian mendengar, merasakan dan menilai ide yang penulis alami selama berada di lapangan.¹⁰

3. Subyek Penelitian

¹⁰Seno, Yanuarius V. *Partisipasi Pendengar Terhadap Program Acara Konsultasi Ekonomi Rumah Tangga (ERT) Radio SATUNAMA AM 864 KHz*. Karya Tulis Ilmiah. FISP UAJY, 2010 (Hal. 23).

Subyek penelitian yang ditentukan yaitu anggota tim PKBL dan penerima bantuan kegiatan *Community Empowering*. Subyek penelitian menjadi penting sentral karena sebagai pemberi data. Tim PKBL dan para pengurus/pemimpin di tempat penerima bantuan kegiatan *Community Empowering* PT. PLN (Persero) APJ Yogyakarta menjadi informan kunci (*key informan*), alasannya adalah karena mereka yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan *Community Empowering*. Penerima bantuan yang dipilih penulis untuk menjadi subyek penelitian yaitu Forum Lansia Ismoyo Wredo Utomo, SD Kanisius Sengkan, dan TK Santa Theresia I. Fungsinya adalah untuk pengecekan data dan informasi sesuai dengan yang terjadi sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu lewat data primer yang dilaksanakan dengan tahap observasi partisipasi yaitu selama kegiatan *internship* di PT. PLN (Persero) APJ Yogyakarta. Penulis mengamati pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketertarikan penulis. Salah satunya mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh tim PKBL yaitu dengan survei ke lokasi pemohon bantuan. Dengan observasi partisipasi ini, penulis dapat secara langsung mengetahui kegiatan survei yang dilakukan oleh tim PKBL. Penulis juga melakukan observasi ke 3 tempat yang menjadi penerima bantuan program kegiatan CE dari PT. PLN (Persero) APJ Yogyakarta. Dengan observasi ini, penulis dapat melihat secara langsung aktivitas komunitas penerima bantuan. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan para anggota tim PKBL untuk mengetahui program Bina Lingkungan, mekanisme kerja dan juga alur masuknya proposal ke tim PKBL. Penulis juga mewawancarai penerima bantuan CSR dari PT. PLN (Persero) khususnya untuk *Community Empowering*. Ini untuk memastikan apakah bantuan yang mereka terima sudah sesuai dengan apa yang mereka

butuhkan dan juga sesuai dengan tujuan dari *Community Empowering* itu sendiri. Penulis saat melakukan wawancara menggunakan panduan wawancara, penulis memberikan pertanyaan seputar pelaksanaan kegiatan CE dan apa yang dilakukan dengan penerima bantuan. Hal ini penulis lakukan karena, penulis lebih melihat informan yang penulis wawancarai sebagai pelaku di lapangan sejalan dengan pendekatan kualitatif itu sendiri. Data sekunder yang penulis manfaatkan yaitu data-data yang telah dirangkum oleh tim PKBL, mencatat berbagai temuan di lapangan dan juga mengakses data dari internet. Penulis menggunakan data dari tim PKBL untuk mendukung kelengkapan observasi partisipasi yang dilakukan penulis, dan dari internet penulis mencari karya tulis yang mirip sehingga bisa digunakan untuk membantu kelancaran penulisan Karya Tulis Ilmiah.

5. Analisa data

Teknik pengolahan dalam pengolahan data ini adalah teknik pengolahan data kualitatif yaitu suatu analisa yang digunakan untuk mengolah data yang sifatnya aktual serta tidak dapat diukur dengan kata-kata. Analisis data terbagi menjadi 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.¹¹ Data yang didapatkan penulis dari lapangan kemudian dianalisis untuk menajamkan, menggolongkan sesuai dengan kebutuhan penulisan. Terdapat data selama penulis melakukan *Internship* di PT. PLN (Persero) APJ Yogyakarta dan data hasil wawancara. Data kemudian diorganisasikan sesuai dengan tahapan penulisan yang dimaksud oleh penulis. Terdapat dua tahap analisa data yaitu tentang proses kerja kegiatan *Community Empowering* dan fakta pelaksanaan kegiatan *Community Empowering* kemudian penulis kaitkan dengan tahapan pemberdayaan dan realitas penerima bantuan. Setelah itu, kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penyajian data.

¹¹Miles, Matthew B. & Hubberman, A.M. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992 (Hal.16).